

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGELOLAAN DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR DALAM  
MENANGANI BANJIR DI KOTA PEKABARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Srata Satu Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Ahmad Ridho Ghifari  
137310380**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Ahmad Ridho Ghifari  
NPM : 137310380  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Pentaan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam  
Menangani Banjir di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam Ujian Konferehensif.

Pekanbaru, Oktober 2020

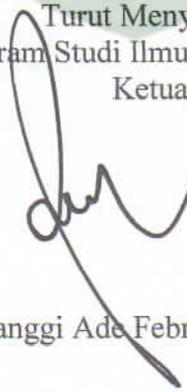
Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. H. Zaini Ali, M.Si

  
Budi Muliando, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Ahmad Ridho Ghifari  
NPM : 137310380  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Pentaan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam  
Menangani Banjir di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Oktober 2020

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,

Nina Yustaini, S.Ip, M.Si

Anggota,

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Anggota,

Budi Muliando, S.Sos, M.IP

Mengetahui,

Wakil Dekan I,

Indra Syafri, S.Sos., M.IP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

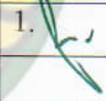
---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

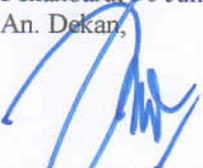
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~902~~ /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 30 Juni 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridho Ghifari  
NPM : 137310380  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi :  
**Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " <sup>83</sup> " ; Huruf : " **A-** "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3.
4.	Budi Mulianto, S.IP., M.Si.	Anggota	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

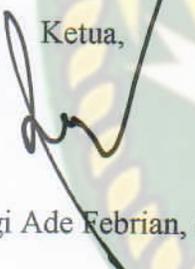
Nama : Ahmad Ridho Ghifari  
NPM : 137310380  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Pentaan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam  
Menangani Banjir di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, Oktober 2020

Ketua,

Sekretaris,

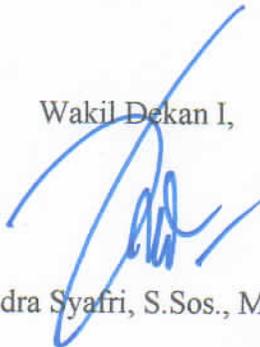
  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

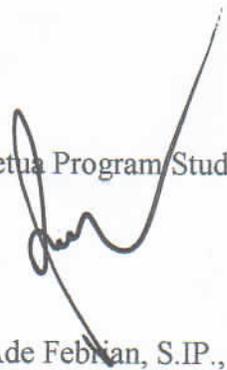
  
Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Ketua Program Studi,

  
Indra Syafri, S.Sos., M.IP

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Budi Muliando, S.Sos, M.IP Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah dan Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Dan kepada seluruh pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan tanggapannya kepada penulis yang bermanfaat didalam penyusunan skripsi.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

***Wassalammualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, Oktober 2020  
Penulis

Ahmad Ridho Ghifari

NPM. 137310380

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Pemerintahan Daerah.....	24
3. Tugas.....	25
4. Manajemen.....	25
5. Sistem Penanganan Banjir.....	29
6. Sistem Drainase.....	30
7. Banjir.....	32
8. Jenis-jenis Banjir.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Konsep Operasional.....	41
E. Operasional Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran.....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	48

B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Teknik Penarikan Sampel.....	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data .....	51
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	53
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	60
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	75
B. Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruag Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru .....	77
C. Hambatan Dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruag Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru .....	92
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
I.1 : Data Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Menangani Banjir .....	9
I.2 : Data Lokasi Banjir Yang Menjadi Objek Penelitian Meliputi Tiga Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	12
II.1 Penelitian Terdahulu.....	37
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru.....	44
III.1 : Populasi dan Sampel.....	49
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru .....	52
V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	75
V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	77
V.4 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perencanaan.....	80
V.5 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengorganisasian .....	82
V.6 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelaksanaan .....	85
V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penganggaran .....	87
V.8 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengawasan .....	89
V.9 : Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam menangani Banjir Di Kota Pekanbaru.....	91

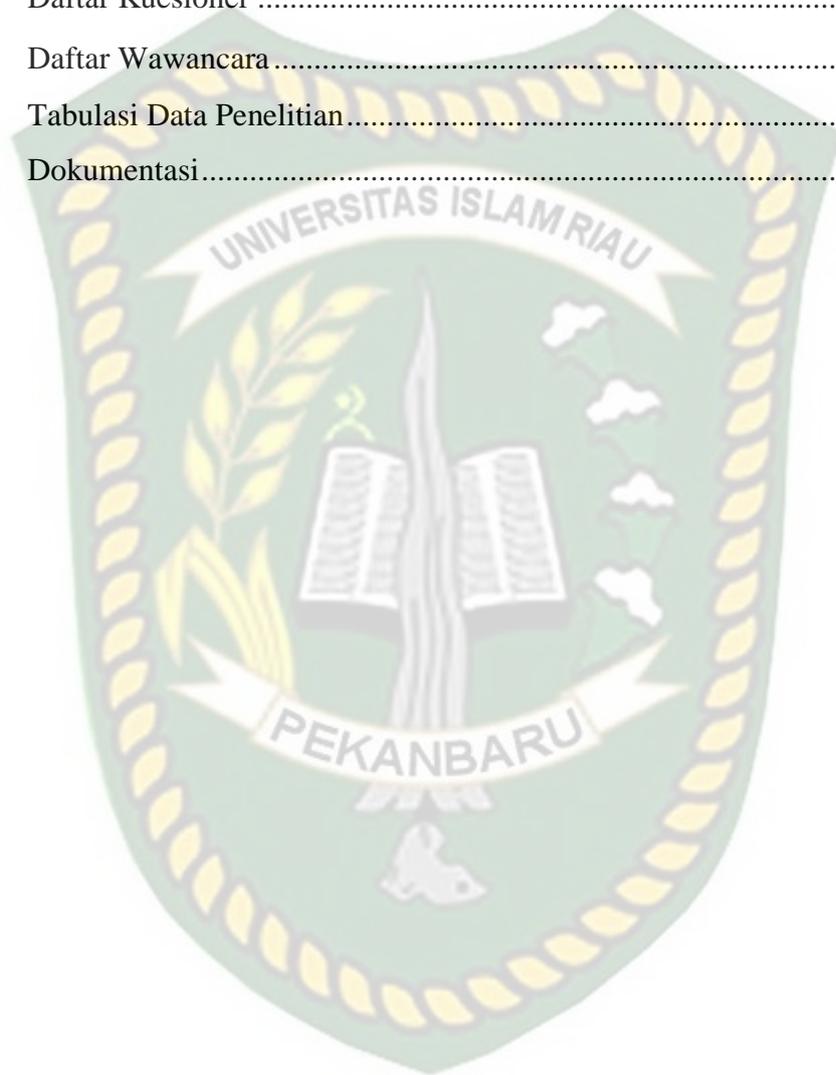
## DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
II.I : Kerangka Pikir .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I : Daftar Kuesioner .....	96
2 : Daftar Wawancara .....	102
3 : Tabulasi Data Penelitian .....	105
4 : Dokumentasi .....	108



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Ridho Ghifari  
NPM : 137310380  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2020  
Pelaku Pernyataan,

Ahmad Ridho Gifari

**PENGLOLAAN DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR DALAM  
MENANGANI BANJIR DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

**Ahmad Ridho Ghifari**

Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir khususnya masalah drainase. Penanganan masalah sistem drainase (khususnya sampah yang adapada drainase) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai produsen sampah juga memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah sampah. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa pengendalian banjir yang dilakukan oleh pihak dinas seperti melakukan pembersihan rainase yang terputus, tersumbat, penangkapan dan sebagainya. Selain itu juga, masih banyaknya bangunan-bangunan yang tidak memiliki drainase yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Padahal syarat mendirikan bangunan yang salah satunya adalah memiliki gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru bahwa Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Akan tetapi masih ada drainase yang belum berfungsi secara menyeluruh, terutama pada kawasan - kawasan rendah dan cekung. Untuk menanggulangi genangan air hujan tersebut diperlukan perencanaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Drainase berwawasan lingkungan adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, dimana pembangunannya terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang. Hambatan dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru adalah sumber daya finansial kurang memadai, banyaknya bangunan liar dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Banjir**

**MANAGEMENT OF DRAINAGE BY THE GENERAL WORK OFFICES  
AND ARRANGEMENT OF SPACE FOR WATER RESOURCES IN  
MANAGING FLOODS IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**Ahmad Ridho Ghifari**

Planning of the Public Works Agency and the Spatial Planning of the City of Pekanbaru in overcoming flooding, especially the problem of drainage. Handling the problem of drainage systems (especially rubbish that is in drainage) is not only the responsibility of the government. Entrepreneurs and the general public as waste producers also have the responsibility in handling waste problems. However, based on the results of the authors' observations that flood control is carried out by the agency such as cleaning raindrops that are interrupted, blocked, captured and so on. In addition, there are still many buildings that do not have drainage in accordance with established rules. Whereas the requirement to build a building, one of which is to have an architectural design drawing (consisting of pictures of the situation, floor plans, looks, pieces, infiltration wells) is planned by an architect who has an IPTB, given a GSB, GSJ and land boundary notation. The purpose of this research is to find out and explain Drainage Management by the Department of Public Works and Spatial Planning in the Field of Water Resources in Dealing with Floods in Pekanbaru City and to determine the supporting and inhibiting factors of Drainage Management by the Department of Public Works and Spatial Planning in the Field of Water Resources Handling Floods in Pekanbaru City. This research was conducted using quantitative methods. With the type of research used in this research is descriptive type. The results showed that the Management of Drainage by the Department of Public Works and Spatial Planning in the Field of Water Resources in Handling Floods in Pekanbaru City that the Management of Drainage by the Department of Public Works and Spatial Planning in the Field of Water Resources in Handling Floods in Pekanbaru City can be said to be quite good. However, there are still drainages that do not function as a whole, especially in low and sunken areas. To cope with the rainwater puddles required planning an environmentally sound drainage system. Environmentally sound drainage is infrastructure that functions to drain surface water into water bodies, where the construction is integrated with the General Spatial Plan. Obstacles in Drainage Management by the Department of Public Works and Spatial Planning in the Field of Water Resources in Handling Floods in Pekanbaru City are inadequate financial resources, the number of illegal buildings and the lack of community involvement.

**Keywords: Management, Flooding**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah

Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota/kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah. Pembagian tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintah. Urusan tersebut meliputi kerukunan antar umat beragama, pengembangan kehidupan demokrasi, pembinaan ketahanan nasional, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi

pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan konflik social, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.

- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini dianggap penting karena salah satu upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota Madya yang ada di Provinsi Riau yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru mempunyai

jumlah Penduduk 950,571 Jiwa. Kota ini membawahi 12 kecamatan dan 63 Kelurahan.

Permasalahan banjir atau genangan air di Kota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama disetiap musim hujan. Di dalam penanggulangan bencana daerah Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Pemerintah daerah merupakan pihak utama yang harus merespon bencana daerah. Instansi Pemerintah yang berperan dalam melakukan penanggulangan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan hal diatas, di dalam pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian umum
  - b. Sub bagian keuangan
  - c. Sub bagian program
3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
  - a. Seksi perencanaan sumber daya air
  - b. Seksi pelaksanaan sumber daya air
  - c. Seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air
4. Bidang Bina Marga, membawahi :
  - a. Seksi perencanaan bina marga
  - b. Seksi pembangunan jalan dan jembatan
  - c. Seksi preservasi jalan dan jembatan
5. Bidang Cipta Karya, membawahi :
  - a. Seksi perencanaan cipta karya
  - b. Seksi pengembangan SPAM dan PLP
  - c. Seksi Penataan Bangunan
6. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
  - a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
  - b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
7. Bidang Tata Ruang, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang
  - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8. Bidang Pertamanan, membawahi :
  - a. Seksi Pertamanan dan Ornamen
  - b. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
  - c. Seksi Pemeliharaan Pertamanan
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari sejumlah organisasi tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatas, penulis memfokuskan pada seksi pelaksanaan sumber daya air, yang mana tugas dan fungsi seksi ini didalam pasal 13 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pelaksanaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik.
3. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan di Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air meliputi pekerjaan konstruksi dan non konstruksi dan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan.
5. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
6. Perumusan dan pelaksanaan rekomendasi perizinan, pelaksanaan pengendalian banjir dan tanah longsor.
7. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari sejumlah tugas Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air tersebut, salah satunya adalah perumusan dan pelaksanaan rekomendasi perizinan, pelaksanaan pengendalian banjir dan tanah longsor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pelaksanaan sumber daya air membuat suatu perencanaan untuk mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

**Tabel I.1 : Data Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Banjir 2019**

No	Kecamatan	Program
1	Pekanbaru Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> <li>5. Normalisasi Sungai Sago</li> </ol>
2	Bukit Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> </ol>
3	Marpoyan Damai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> </ol>
4	Lima Puluh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> <li>5. Normalisasi Sungai Tanjung Batu</li> <li>6. Pompa Banjir</li> </ol>
5	Payung Sekaki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waduk penampungan air</li> <li>2. Drainase primer</li> <li>3. Drainase sekunder</li> <li>4. Normalisasi saluran drainase</li> <li>5. Gorong-gorong (<i>box culvert</i>)</li> <li>6. Normalisasi Sungai Air Hitam</li> <li>7. Pompa banjir</li> <li>8. Pintu Air</li> </ol>
6	Sukajadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> </ol>
7	Senapelan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> <li>5. Normalisasi Sungai Senapelan 1,2, dan 3</li> <li>6. Pompa Banjir</li> <li>7. Pintu Air</li> </ol>

8	Tenayan raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> </ol>
9	Sail	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> <li>5. Normalisasi Sungai Sail</li> <li>6. Pompa Banjir</li> <li>7. Pintu Air</li> </ol>
10	Tampan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> </ol>
11	Rumbai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> <li>5. Normalisasi Sungai Siak</li> <li>6. Pompa Banjir</li> <li>7. Pintu Air</li> </ol>
12	Rumbai Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase primer</li> <li>2. Drainase sekunder</li> <li>3. Normalisasi saluran drainase</li> <li>4. Gorong-gorong (<i>bok culvert</i>)</li> <li>5. Normalisasi Sungai Siak</li> <li>6. Pompa Banjir</li> <li>7. Pintu Air</li> </ol>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan tabel I.1 dapat diketahui perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir khususnya masalah drainase. Banjir dikota Pekanbaru salah satunya juga disebabkan oleh tersumbatnya saluran drainase oleh sampah-sampah. Penanganan masalah sistem drainase (khususnya sampah yang ada pada drainase) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai produsen sampah juga memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah sampah. Namun dari yang peneliti lihat dan temukan masih banyak masyarakat yang secara sengaja membuang sampah kesaluran drainase tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah dan masyarakat umum serta pelaku usaha

kurang sejalan dan kurangnya kerjasama serta kesadaran diri sendiri dalam menjaga dan memelihara drainase yang dimana seharusnya bekerja sama dalam menangani masalah sampah mulai dari sumber sampah sampai pada pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien tentunya memerlukan siklus pendekatan menyeluruh dan pemusnahannya melalui kebijakan regulasi reuse, reduce, dan recycle.

Adapun Rencana Umum Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru (RUTRK) untuk mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru Realisasi Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.2: Data Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru Untuk Mengatasi Genangan dan Banjir Realisasi Tahun 2019**

No.	Program	Acuan/Landasan	Pelaksana Program
1	Pembangunan kolam/waduk	Pelaksanaan RTRW Provinsi Riau Tahun 2019	Dinas PU Kota Pekanbaru
2	Pembangunan sumur resapan	Perizinan Pembangunan Perumahan Baru	Dinas PU Kota Pekanbaru
3	Penghijauan	<i>Masterplan</i> Drainase Kota Pekanbaru tahun 2019	Dinas Kehutanan Provinsi Riau
4	Normalisasi sungai	<i>Masterplan</i> Drainase Kota Pekanbaru Tahun 2019	Dinas PU Kota Provinsi Riau
5	Pompa banjir	<i>Masterplan</i> Drainase Kota Pekanbaru Tahun 2019	Dinas PU Kota Provinsi Riau
6	Pembangunan drainase	<i>Masterplan</i> Drainase Kota Pekanbaru Tahun 2019	Dinas PU Kota Pekanbaru
7	Normalisasi drainase	<i>Masterplan</i> Drainase Kota Pekanbaru Tahun 2019	Dinas PU Kota Pekanbaru

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

Permasalahan penanganan banjir di kota Pekanbaru sebenarnya berawal dari perencanaan Dinas Pekerjaan Umum yang kurang efektif dan efisien padahal anggaran yang digunakan dalam mengatasi masalah banjir di Pekanbaru juga

tidak sedikit. Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum kota Pekanbaru sudah menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih sebanyak 12 miliar pada tahun 2019. Hal itu berarti pemerintah kota Pekanbaru cukup serius untuk mengatasi banjir di kota Pekanbaru tetapi peneliti banyak menemukan keadaan dilapangan yang tidak sesuai seperti pembangunan drainase yang belum selesai dilaksanakan dan ada juga pembangunan drainase yang seharusnya ukurannya besar tetapi dibangun dengan ukuran yang kecil.

Sejalan dengan hal diatas, dari 12 kecamatan yang merupakan wilayah terkena banjir di Kota Pekanbaru, penulis memfokuskan pada kecamatan yang paling sering terjadi banjir yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Marpoyan Damai dan Bukit Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3 : Data Lokasi Banjir di Kecamatan Pekanbaru Kota**

No	Kecamatan	Nama Tempat/Jalan	Besaran Genangan	
			Tinggi (m)	Lama (jam)
1	Pekanbaru Kota	1. Jl. Ahmad Yani	0,4	3
		2. Jl. Sudirman	0,4	4
		3. Jl. Pangeran Hidayat	0,3	4
		4. Jl. Hangtuah	0,3	4
		5. Jl. Ade Irma Suryani	0,4	3
		6. Jl. Siberut	0,3	3
		7. Jl. Engganu	0,3	3
		8. Jl. Serasan	0,3	3
		9. Jl. Sumatera	0,3	3
		10. Jl. Pattimura	0,4	4
2	Marpoyan Damai	1. Jl. Terubuk	0,3	4
		2. Jl. Markisa	0,3	4
		3. Jl. Duku	0,3	4
		4. Jl. Tambusai	0,4	4
		5. Jl. Gulama	0,4	4
		6. Jl. Merak	0,3	3
		7. Jl. Arifin Ahmad	0,3	4
		8. Jl. Kereta Api	0,3	3
		9. Jl. Paus	0,3	4

		10. Jl. Garuda	0,3	3
3	Bukit Raya	1. Jl. Kandis Ujung	0,3	3
		2. Jl. Banda Aceh	0,3	3
		3. Jl. Parit Indah	0,3	4
		4. Jl. Bukit Barisan	0,3	4
		5. Jl. Rawamangun	0,3	3
		6. Jl. Surabaya	0,3	4
		7. Jl. Lumba-lumba	0,3	3
		8. Jl. Kaharudin Nasution	0,4	3
		9. Jl. Karya Seni	0,3	3
		10. Jl. Tengku Bey	0,3	3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru tahun 2019

Berdasarkan tabel I.2 terlihat bahwa kecamatan tersebut paling sering terjadi banjir. Hal ini kurangnya pengendalian banjir yang dilakukan oleh pihak dinas seperti melakukan pembersihan drainase yang terputus, tersumbat, penangkapan dan sebagainya. Selain itu juga, masih banyaknya bangunan-bangunan yang tidak memiliki drainase yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Padahal syarat mendirikan bangunan yang salah satunya adalah memiliki gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah.

Kurangnya pemeliharaan drainase yang ada oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru maupun rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kondisi drainase dilingkungannya. Contohnya seperti yang ada di sepanjang jalan Kaharudin Nasution Kecamatan Bukit Raya dimana banyaknya saluran drainase yang tersumbat oleh sampah maupun tanah. Dalam hal ini dinas PU kota Pekanbaru kurang tanggap dalam mengatasinya karena apabila banjir sudah terjadi barulah mereka bekerja untuk membersihkan saluran drainase tersebut.

Permasalahan banjir atau genangan banjir dikota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama disetiap musim hujan. Oleh sebab itu permasalahan banjir dikota Pekanbaru ini tidak hanya menjadi permasalahan Dinas PU saja tetapi juga dinas-dinas terkait yang berada dalam lingkungan pemerintah kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau.

Persoalan drianse ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Pekanbaru saja, tapi juga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang juga memiliki kewenangan menangani persoalan drainase di lingkungan-lingkungan pemukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang juga harus menangani sampah-sampah yang ada disekitar saluran drainase, selanjutnya ada juga kewenangan dari Satpol-PP dalam memberikan peringatan kepada pemilik bangunan liar yang berdiri diatas drainase serta peran Lurah dan Camat kota Pekanbaru yang bertanggung jawab untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tetang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam drainase.

Dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan normalisasi seperti pembersihan saluran-saluran drainase diantaranya, ada galian lumpur dan pembuangan sampah yang ada disaluran drainase. Untuk operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pasukan kuning yang terdiri dari 12

kelompok yang telah disesuaikan berdasarkan jadwal yang telah dibuat. Baik itu untuk pembersihan saluran dari sampah dan sedimen maupun pembersihan rumput-rumput yang tumbuh disekitar saluran drainase.

Kelengkapan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase perkotaan antara lain yaitu:

1. Mobil keamanan, untuk membantu pengamanan pekerjaan di jalan raya
2. Dump Truck, untuk mengangkut bahan material pekerja dan untuk mengangkut sedimen atau sampah.
3. Excavator, untuk menggali sedimen.
4. Compressor, untuk membersihkan areal pekerja.
5. Mobil box terbuka, untuk mengangkut sedimen dalam volume kecil.
6. Cangkul, untuk menggali tanah, memindahkan tanah dan untuk mengaduk semen.
7. Sabit, untuk memotong rumput dan ilalang.
8. Penggaruk, untuk membersihkan sisa potongan rumput di daerah sekitar saluran dan mengangkat sampah dari badan saluran.
9. Dll.

Dengan adanya data diatas, menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya sudah menjalankan tupoksinya yaitu dengan melakukan normalisasi. Namun pada kenyataannya dilapangan yang peneliti temukan adalah keadaan drainase yang memprihatinkan seperti banyaknya tumpukan sampah, sedimen yang mengendap disaluran drainase dan

juga tidak terawatnya drainase seperti tanaman atau rumput yang tumbuh subur disaluran drainase.

Selain itu juga, penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi dilapangan :

1. Kurangnya pemeliharaan drainase yang ada oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air di Kota Pekanbaru
2. Masih banyaknya drainase yang terputus, tersumbat yang tidak dilakukan pemeliharaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dan fakta-fakta yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh yang akan dituangkan dalam bentuk Usulan Penelitian dengan judul : **“Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa gejala permasalahan yang dikemukakan diatas maka perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu maka penulis mencoba untuk merumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *“Bagaimana Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru?”*.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penulisan ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada seluruh unsur yang berkepentingan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menjalankan atau melaksanakan kewajibannya.
- c. Sebagai Akademik bahan informasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru tentang bagaimana strategi penanganan banjir di Kota Pekanbaru dan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

## BAB II

### STUDI PERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Keperpustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan - persoalan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan - badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam perturan perundang - undangan. Pemerintahan merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur - unsur pemenuhan kebutuhan agar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu berkerjasama dan berkelompok dengan orang lain, dan makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk berkerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi agar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan skunder tersebut pula institusi sosial yang dapat memberikan pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integritas) anggota, masyarakat (Maliniwski dalam Garna, 1996 : 55). Untuk membentuk institusi - institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau (Terjemahan Sumardjo, 1996 : 15) adalah

konflik kontrak sosial (Social Contract). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat, pemerintahan moderen, dengan kata lain hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan Geabler (Rasyid, 2000; 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan kerana itulah tugas pemerintahan adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberi pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk membuat untuk membuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (Dalam Hamdi, 2009 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintah suatu ilmu mencakup 2 (Dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayan umum di

kelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan : kedua, masalah bagaimana sebaiknya.

Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan, dimana dalam paradigma lama pemerintahan memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / negara (Yusri Munaf 2016 : 47).

Adanya fenomena semakin majunya masyarakat diikuti dengan meningkatnya permasalahan didalamnya dan birokrasi yang cenderung semakin besar, sehingga disekitar awal dekade 90-an muncul satu paradigma baru dalam pemerintahan yakni *Good Governance* berasal dari istilah *governance* sebagai pengganti istilah administratif negara (Yusri Munaf 2016 : 63).

Dalam *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Yusri Munaf menjadi hal yang sangat penting didalam pemahaman terhadap asas - asas pemerintahan (2016 : 64). kemudian Yusri Munaf membagi asas - asas pemerintahan yang menjadi 2 (Dua) golongan, yaitu (2016 : 64-65)

- a. Golongan I dilihat dari proses / prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan :
  1. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan / keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan / keputusan yang dikeluarkan.

2. Kebijakan / keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak - hak warga negara, kebijakan / keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat.

3. Antara *ko nsiderans* (Pertimbangan / Motofasi) dengan dictum / penetapan keputusan tersebut sesuai dan didasarkan pada fakta - fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Golongan II dilihat dari kebenaran fakta - fakta, yaitu :

1. Asas Larangan Kesewenang – Wenangan

Kesewenang - wenangan ini bisa timbul apabila perubahan jabatan atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang - wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan / pendapat.

2. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang Atau Larangan *Detournement De pouvoir*.

Penyalahgunaan wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang diberikan atau ditentukan undang - undang.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

#### 4. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

#### 5. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### 6. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

#### 7. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan pertauran perundang - undangan yang berlaku.

#### 8. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Adapun untuk lebih jelas memaknai arti pemerintahan dapat dilihat dari beberapa konsep menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Syafiie (2005 : 20) mengatakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kekuatan.

Sedangkan menurut Ndraha (2005 : 36) pemerintah merupakan semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud pemerintahan adalah proses penemuan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Situmorang (1993 : 3), dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafiie, 2005 : 32) memaparkan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur - unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam hubungan antara dinas - dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagaimana suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis problem - problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan - pertentangan antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengesahkan agar dapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dan pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas - luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode - metode bekerja yang setepat - tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

## **2. Pemerintahan Daerah**

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah Siswanto Sunarno (2008;54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat local.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (Azam Awang, 2011)

### **3. Tugas**

Menurut Moekijat (1998; 11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari satu unsur element atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Sementara Stone dan Moekijat (1998; 10) mengemukakan bahwa tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat (1998; 10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

### **4. Manajemen**

Manajemen merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau instansi tersebut. Dalam manajemen

sendiri bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang tersedia dalam organisasi atau instansi.

Menurut Mary Parker Follet (dalam Handoko, 2014:8), mendefinisikan bahwa Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan, 2014:2), menyatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut John D. Millet (dalam Sukarna, 2011: 2) menjelaskan bahwa *Management Is The Process Of Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End* (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengatur orang lain dalam suatu organisasi agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi lima fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Budgetting* (Pengganaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

a. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas - tugas tertentu untuk masing - masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. *Budgetting* (Pengggaran)

Menurut George R. Terry merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

e. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *controlling*, yaitu Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian control

mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### 5. Sistem Penanganan Banjir

Penanggulangan banjir perlu dilakukan untuk menangani banjir dalam keadaan darurat, terutama untuk bangunan pengendali banjir yang rusak dan kritis. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan penanggulangan banjir antara lain :

a. Identifikasi masalah

Sebelum terjadi banjir sebaiknya dilakukan pemeliharaan tanggul dan bangunan pengendali banjir, didalam survey perlu dilakukan identifikasi pada tempat – tempat tertentu di sepanjang sungai yang rawan terhadap banjir dan perlu di buat map untuk daerah rawan banjir di dataran rendah.

b. Kebutuhan bahan dan peralatan penanggulangan

Bahan peralatan yang diperlukan untuk penanggulangan banjir harus disiapkan sebelum banjir dan dalam keadaan baik. Bahan yang perlu disiapkan antara lain bronjong, karung plastic, ijuk, kayu. Sedangkan peralatan yang perlu dipersiapkan meliputi Alat kerja (Sekop, gergaji, cangkul, dsb), alat transportasi, alat komunikasi, peralatan penerangan, perlengkapan personil.

c. Kebutuhan tenaga penanggulangan

Tenaga penanggulangan harus jelas pembagiannya dan di buat dalam kelompok (Kelompok ronda, pengamat, penanggulangan darurat dan regu cadangan) pengerahan tenaga perlu didiskusikan dengan aparat

pemerintah setempat dan sesuai dengan wewenang pada satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana alam (Satkorlak PBA)

Menurut Kodoatie, dan Sugiyanto (2002; 87), sistem pengendalian banjir pada suatu daerah perlu dibuat dengan baik dan efisien, memperhatikan kondisi yang ada dan pengembangan pemanfaatan sumber air mendatang. Pada penyusunan sistem pengendalian banjir perlu adanya evaluasi dan analisis atau memperhatikan hal-hal yang meliputi :

1. Analisis cara pengendalian banjir yang ada pada daerah tersebut atau yang sedang berjalan
2. Evaluasi dan analisis daerah genangan banjir, termasuk data kerugian akibat banjir
3. Evaluasi dan analisis tata guna tanah di daerah studi, terutama di daerah dataran banjir
4. Evaluasi dan analisis daerah pemukiman yang ada maupun perkembangan yang akan datang
5. Memperhatikan potensi dan pengembangan sumber daya air mendatang
6. Memperhatikan pemanfaatan sumber daya air yang ada termasuk bangunan yang ada

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapat direncanakan sistem pengendalian banjir dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

## **6. Sistem Drainase**

Menurut Suripin (2004; 87), Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan

merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase yang berasal dari bahasa Inggris yaitu drainage mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu.

Menurut Kodoatie (2003; 16) sistem jaringan drainase di dalam wilayah kota dibagi atas2 (dua) bagian yaitu:

- a. Sistem Drainase Primer, yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Pada umumnya sistem drainase primer ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama.
- b. Sistem Drainase Selunder, yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air kesaluran drainase primer dari daerah tangkapan hujan maupun air yang berasal dari masyarakat sekitar.

Menurut Kodoatie (2003; 18), fungsi drainase adalah sebagai berikut :

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat dari permukiman) dari genangan air, erosi dan banjir.
2. Karena aliran lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko kesehatan lingkungan, bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya.

3. Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar dari kelembaban.
4. Dengan sistem yang baik tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan lainnya.
5. Pembangunan sistem drainase perkotaan perlu memperhatikan fungsi drainase.
6. sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep berwawasan lingkungan.

## **7. Banjir**

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Peraturan Dirjen RLPS Nomor 04 tahun 2009). Banjir juga dapat didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya.

Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. (Rahayu dkk, 2009; 56). Adapun kategori atau jenis banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir, antara lain :

- a. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya, terdiri dari :
  1. Banjir kiriman (banjir bandang) yaitu banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan di daerah hulu sungai.
  2. Banjir lokal yaitu banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi kapasitas pembuangan di suatu wilayah
- b. Berdasarkan mekanisme terjadinya banjir, yaitu :
  1. *Regular flood* yaitu banjir yang diakibatkan oleh hujan
  2. *Irregular flood* yaitu banjir yang diakibatkan oleh faktor selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan.

Banjir berasal dari aliran limpasan yang mengalir melalui sungai atau menjadi genangan. Sedangkan limpasan adalah aliran air mengalir pada permukaan tanah yang ditimbulkan oleh curah hujan setelah air mengalami infiltrasi dan evaporasi, selanjutnya mengalir menuju ke sungai (Hadisusanto, 2010; 76). Dalam (Suripin, 2004; 90) menerangkan, banjir adalah suatu kondisi dimana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang (palung sungai) atau terhambatnya air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap mengenai daerah (dataran banjir) sekitarnya. Selanjutnya dinyatakan bentuk hidrograf banjir pada suatu daerah tangkapan ditentukan oleh 2 hal yaitu :

- a. Karakteristik hujan lebat yaitu didistribusi dari intensitas hujan dalam waktu dan ruang
- b. Karakteristik daerah tangkapan seperti : luas, bentuk, sistem saluran dan kemiringan lahan, jenis, dan distribusi lapisan tanah serta struktur geologi dan geomorfologi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan jenis bencana alam yang dimana suatu daerah daratan dipenuhi oleh air atau sejenis benda cair lainnya yang mengakibatkan kerugian dalam waktu tertentu.

### **8. Jenis-Jenis Banjir**

Ada dua peristiwa banjir, pertama peristiwa banjir/genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir dan kedua peristiwa banjir terjadi karena limpasan air banjir dari sungai karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada (Sugiyanto, 2002). Kelebihan air yang menggenangi suatu daerah yang biasanya kering terjadi sebagai akibat kapasitas sungai tidak mampu menampung air yang mengalir di atasnya atau berlebihnya air hujan lokal. Kelebihan air hujan lokal yang menyebabkan banjir dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu telah jenuhnya tanah di tempat tersebut dan masih tingginya ketinggian muka air di dalam alur sungai. Kejenuhan tanah yang tinggi akan menyebabkan tingkat penyerapan tanah (infiltrasi) jadi rendah sehingga aliran permukaan (surface runoff) menjadi tinggi. Tingginya aliran permukaan sebagai akibat hujan berlebih tersebut dapat ditampung oleh badan sungai. Akibat air berlebih (banjir) sebagai

akibat luapan air sungai ataupun hujan lokal maka akan menyebabkan terbentuknya bentukan banjir dan dalam skala yang lebih luas lagi masuk dalam kelas bentukan fluvial (Somantri, 2008; 67).

Ligal ( 2008; 35), menyebutkan bahwa banjir terdiri dari tiga jenis, yaitu :

a. Banjir Kilat

Banjir kilat/dadakan biasanya didefinisikan sebagai banjir yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari 5 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Umumnya banjir dadakan akibat meluapnya air hujan yang sangat deras, khususnya bila tanah bantaran sungai rapuh dan tak mampu menahan cukup banyak air. Penyebab lain adalah kegagalan bendungan/tanggul menahan volume air (debit) yang meningkat, perubahan suhu menyebabkan berubahnya elevasi air laut dan atau berbagai perubahan besar lainnya di hulu sungai termasuk perubahan fungsi lahan. Kerawanan terhadap banjir dadakan akan meningkat bila wilayah itu merupakan lereng curam, sungai dangkal dan penambahan volume air jauh lebih besar daripada yang tertampung.

b. Banjir Luapan Sungai

Luapan sungai berbeda dari banjir dadakan karena banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama, meskipun proses itu bisa jadi lolos dari pengamatan sehingga datangnya banjir terasa mendadak dan mengejutkan. Selain itu banjir luapan sungai kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti. Penyebabnya adalah hutan gundul,

kelongsoran daerah-daerah yang biasanya mampu menahan kelebihan air ataupun perubahan suhu/musim, atau terkadang akibat kedua hal itu sekaligus. Banjir terjadi sepanjang sistem sungai dan anak-anak sungainya, mampu membanjiri wilayah luas dan mendorong peluapan air di dataran rendah, sehingga banjir yang meluap dari sungai-sungai selain induk sungai biasa disebut banjir kiriman. Besarnya banjir tergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi-kondisi tanah (kelembaban tanah, vegetasi, perubahan suhu/musim, keadaan permukaan tanah yang tertutup rapat oleh bangunan batu bata, blok-blok semen, beton, pemukiman/perumahan dan hilangnya kawasan-kawasan tangkapan air/alih fungsi lahan.

c. Banjir Pantai

Banjir yang membawa bencana dari luapan air hujan sering makin parah akibat badai yang dipicu oleh angin kencang sepanjang pantai. Air payau membanjiri daratan akibat satu atau perpaduan dampak gelombang pasang, badai, atau tsunami (gelombang pasang). Sama seperti banjir luapan sungai, hujan lebat yang jatuh di kawasan geografis luas akan menghasilkan banjir besar di lembah-lembah pesisir yang mendekati muara sungai (Ligal, 2008; 78).

## B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
A/n. Irna Setri	Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Pengendalian Banjir (Studi DI Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)	Lokasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air	Fenomena : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Pengawasan atau survey ke wilayah – wilayah korban banjir oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari banyaknya banjir terjadi pada daerah itu-itu saja seperti pada daerah kelurahan tangkerang labuai dan kelurahan tangkerang utara.</li> <li>2. Banyak nya laporan banjir yang terjadi setiap tahun kepada pemerintah daerah dan kecamatan bukit raya kota pekanbaru. Yakni pada tahun 2014 terjadi 12 titik banjir.</li> <li>3. Belum adanya tindak lanjut atau perbaikan terhadap drainase-drainase rusak maupun tersumbat diwilayah kecamatan bukit raya kota pekanbaru.</li> </ol> Indikator : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.</li> <li>2. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.</li> <li>3. Program pengembangan dan penyediaan air baku.</li> <li>4. Program pengendalian banjir.</li> </ol>
A/n Syilvina Rusadi	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan	Lokasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Fenomena : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan baik bangunan setelah berlakunya Peraturam</li> </ol>

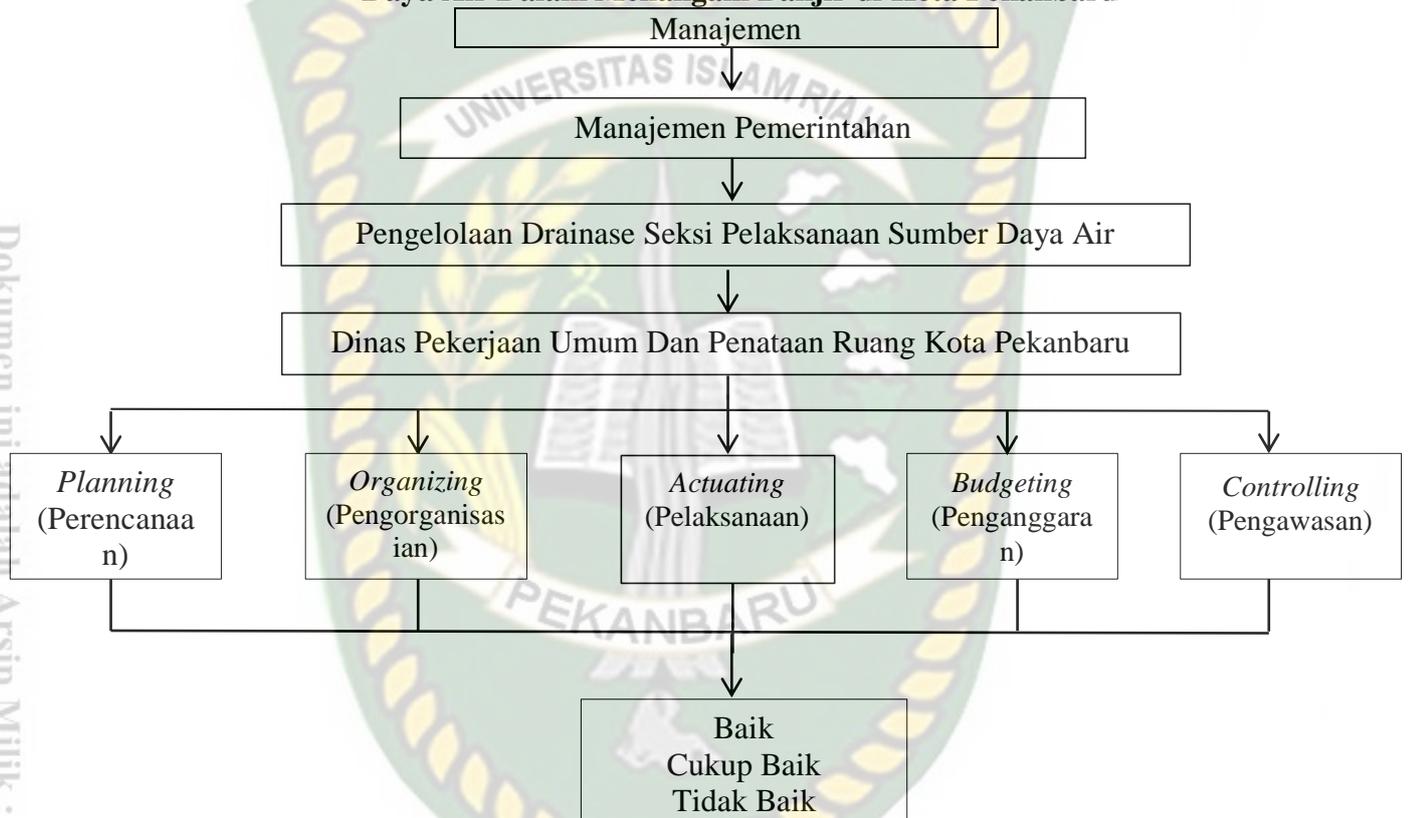
1	2	3	4
	Tampan (Studi Pelaksanaan Pasal 18 ayat 1 dan 3 serta 19 ayat 3 dan 4)	Ruang Bidang Sumber Daya Air	Daerah kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 maupun sebelum berlaku, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bangunan yang telah berdiri namun belum memiliki sumur. 2. resapan wajib membuat sumur resapan susulan. 3. Tidak adanya pengecekan maupun pemeriksaan yang di lakukan oleh dinas terkait terhadap bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Indikator : 1. Pasal 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan atau badan hukum.</li> <li>b. Apabila lokasi pembuatan sumur resapan tidak memungkinkan maka harus membangun lokasi pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah kota.</li> </ul> 2. Pasal 19 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengecekan sumur resapan oleh dinas terkait.</li> <li>b. Bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki sumur resapan, wajib membuat sumur resapan susulan.</li> </ul>
A/n Momo Kelana	Analisis Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di kota pekanbaru	Lokasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air	Fenomena : 1. Kurangnya pemeliharaan drainase yang ada oleh dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru maupun rendahnya keasadaran masyarakat untuk ikut menjaga kondisi drainase dilingkungannya. 2. Perkembangan Kota yang mulai terjadi menyebabkan perubahan

1	2	3	4
			<p>fungsi tata guna lahan daerah tak terbangun (tanah kosong) menjadi daerah terbangun (menjadi bangunan gedung, perumahan, jalan dan fasilitas fisik lainnya), sehingga daerah resapan air permukaan dan daerah tampungan air sementara semakin berkurang.</p> <p>3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan tidak dimbangi dengan pembangunan saluran pembuang (drainase) yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan.</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembangunan Drainase dan gorong – gorong</li> <li>2. Rehabilitasi atau pemeliharaan Normalisasi saluran sungai</li> <li>3. Rehabilitasi atau pemeliharaan Normalisasi Drainase</li> <li>4. Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase</li> </ol>

### C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru**



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

#### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralkan kesalahan pemahaman penelitian ini, maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variable. Adapun konsep itu adalah:

1. Pemerintah : Pemerintah merupakan semua badan atau organisasi yang berfungsi memnuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud pemerintah adalah proses pemenuhan dan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.
2. Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan
3. Manajemen organisasi adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
4. Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
5. Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor fisik yang cocok

bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

6. Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
7. Penganggaran adalah kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.
8. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)
9. Drainase adalah merupakan salah satu fasilitas dasar atau sarana dan prasarana yang berfungsi mengalirkan air dan dirancang sebagai sistem guna menangani banjir dalam rangka kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
10. Drainase primer adalah saluran air yang dibangun oleh instansi terkait dengan memanfaatkan aliran anak sungai yang sudah ada dan juga

merupakan saluran air yang menampung air yang berasal dari saluran drainase sekunder

11. Drainase sekunder adalah saluran drainase yang mengalirkan air menuju kesaluran drainase primer yang sengaja dibuat untuk menampung air hujan maupun air yang berasal dari masyarakat sekitar.
12. Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air yang terbuat dari berbagai jenis material seperti baja dan beton.
13. Banjir adalah kondisi air yang menggenangi suatu area atau tempat yang luas atau terendahnya daratan yang semula tidak terendam air menjadi terendam akibat volume air yang bertambah yang disebabkan oleh meluapnya sungai maupun saluran air.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

### E. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
Manajemen organisasi adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya	Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru	Perencanaan	1. Mengidentifikasi permasalahan 2. Mengimplementasi rencana tindakan	Ordinal
		Pengorganisasian	1. Kerjasama dengan instansi lain 2. Koordinasi tugas dan wewenang	Ordinal
		Pelaksanaan	1. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 2. Melakukan program normalisasi saluran drainase	Ordinal
		Penganggaran	1. Penyusunan anggaran dana 2. Menyediakan fasilitas	Ordinal
		Pengawasan	1. Melaksanakan pemeriksaan 2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

## F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap perencanaan variable dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3(tiga) kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Adapun teknik yang digunakan dalam variable penelitian adalah sebagai berikut:

Baik	: Apabila skor dari hasil rekapitulasi responden antara 66-100 %
Cukup baik	: Apabila skor dari hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
Tidak baik	: Apabila skor dari hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat dilihat dapat dikategorikan sebagai berikut :

### 1. Perencanaan, dapat dikatakan :

Baik	: Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %
Cukup baik	: Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.
Tidak baik	: Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 0-33 %.

### 2. Pengorganisasian, dapat dikatakan :

Baik	: Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %.
------	--

Cukup baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.

Tidak baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 0-33 %.

3. Pelaksanaan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %.

Cukup baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.

Tidak baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 0-33 %

4. Penganggaran, dapat dikatakan :

Baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %.

Cukup baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.

Tidak baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 0-33 %

5. Pengawasan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %.

Cukup baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.

Tidak baik : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 0-33 %



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe Deskriptif. Menurut Darmadi (2013;6) metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, adapun analisa dalam penelitian ini mengenai permasalahan yang dihadapi Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Pemilihan kantor Dinas tersebut karena merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan strategi atau program dalam mengatasi genangan dan banjir.

Adapun lokasi banjir yang akan menjadi objek dari penelitian ini meliputi 3 Kecamatan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya. Alasan dari peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah karena

1. Lokasi ini merupakan lokasi yang paling sering terjadi banjir disaat musim hujan.

2. Lokasi penelitian tersebut sampai saat ini belum mendapat perhatian khusus terutama mengenai masalah banjir.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2012;90)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Bidang Sumber Daya Air, Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Staf Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Masyarakat pengguna program di wilayah proyek banjir. Untuk lebih detailnya masalah populasi dan sampel ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1 : Populasi dan Sampel**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1	1	100 %
3	Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air	1	1	100%
4	Masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota	-	10	100%
5	Masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai	-	10	100%
6	Masyarakat di Kecamatan Bukit Raya	-	10	100%
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>33</b>	

*Sumber: Data Olahan 2019*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Staf Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air karena jumlah populasinya relatif sedikit maka penentuan sampel dengan menggunakan teknik sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

Untuk masyarakat untuk setiap kecamatan, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan menetapkan 30 orang yang ditinggal di kecamatan tersebut sebagai responden yang dirasakan cukup mewakili responden lainnya.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden meliputi hasil kusioner yang berkenaan dengan Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru serta hasil wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan sumber data dan informasi yang berkaitan dengan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini berupa Visi dan Misi

Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi Dina PUPR Kota Pekanbaru, Daftar Urut Kepangkatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Kusioner (angket), yaitu peneliti membuat daftar pernyataan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian disebarakan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
2. Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti memberikan dialog dan pertanyaan berkenaan dengan masalah yang ada.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan ini seluruh data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang empirik.
4. Dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan caramengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber

#### **G. Teknik Analisi Data**

Dalam Melakukan penelitian ini seluruh data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, data-data yang peneliti peroleh dikelompokkan dalam bentuk tabel-tabel. Dari data yang dikelompokkan dalam tabel-tabel tersebut kemudian peneliti dapat

menganalisisnya dengan cara menghubungkannya kedalam teori-teori yang telah peneliti kutip dari para ahli sehingga nantinya penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang baik dalam penelitian ini.

## H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru, direncanakan selama 6 bulan yaitu mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru**

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019/2020															
		Oktober				Desember				Februari				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		x	X	X												
2	Seminar UP						x	x									
3	Perbaikan UP							x	X								
4	Pembuatan daftar Kuisisioner									x	x						
5	Pengurusan rekomendasi penelitian									x							
6	Penelitian lapangan									x	x	x					
7	Penelitian dan analisis data									x	x	x	x				
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)										x	x	x				
9	Konsultasi perbaikan skripsi													X	x		
10	Ujian skripsi															X	
11	Revisi dan perbaikan skripsi															X	X
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

## BAB IV METODE PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

#### 1. Sejarah singkat Kota Pekanbaru.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom

yang disebut *Haminte atau Kotapraja*. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan KepMendagri Nomor 52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

## **2. Keadaan Geografi.**

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35.6 °C dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 Kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian

dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

### **3. Kependudukan.**

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96 % dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan bahasa minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, jawa, batak dan tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok

etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharudin Nasution menjadi penguasa perang riau daratan.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini.

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Al-Quran tingkat Nasiopnal yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-Quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang uusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirim 6 orang utusan.

#### **4. Pemerintahan.**

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota. Efektifitas pemerintahan kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. Orde Baru.

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai walikota sampai dengan tanggal 10 Desember 1970 dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penerbitan periode pemerintahan kota, dan pada tanggal 5 Juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H, pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selama dua periode.

b. Otonomi Daerah.

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru, kecenderungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan

ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakatnya atau keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah, M.M sebagai walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah satu walikota yang berhasil dalam menerbitkan sistem birokrasi pemerintahan Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency Internasional Indonesia, kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai dengan 10.

#### **5. Perekonomian.**

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan yaitu dengan nama Pekansekawan. Perkembangan perekonomian pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, publikm pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengelolaannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79 % , dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30 %. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi

masing-masing sebesar 0,88 % dan 0,02 %. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26 % terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07 % pada bulan Januari 2010 dan 2,14 % pada tahun Februari 2010.

Posisi sungai siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa ini menjadi andalan kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perkembangan perbelanjaan modern, diantaranya plaza senapelan, plaza citra, plaza sukaramai, mal pekanbaru, mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana, dan Giant. Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain pasar bawah, pasar raya senapelan, pasar andil, pasar rumbai, pasar limapuluh dan pasar cik puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 % dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk

penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri kecil baru.

### **B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dimulai pada saat Pekanbaru masih berstatus Swatentra. Pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum yang dikepalai oleh Sucipto dari tahun 1963 sampai tahun 1967 yang berkantor di Senapelan atau tepatnya di Kantor Lurah Kampung Bandar, kemudian beliau diganti oleh Ahmad Fakieh, BA dari tahun 1967 sampai tahun 1978 dimana Dinas Pekerjaan Umum pada saat itu sama-sama berada di Kantor Walikota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bangunan senapelan saat ini.

Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat dan semakin banyak membutuhkan kegiatan pemerintahan maka sejalan dengan Itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru segera membangun Kantor Walikota, padamasa itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dijabat oleh Yazmi Yahya Bmue, dimulai tahun 1978 sampai tahun 1982.

Pada saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan suatu konsep struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan memperkirakan kebutuhan terhadap fungsi serta perkembangan Kota Pekanbaru yang cukup pesat. Maka struktur organisasi pekerjaan umum tersebut diganti melalui Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : Kpts. 061/HOT.15/1962, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 1 Mei 1982 dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Cipta Karya.
3. Seksi Bina Marga.
4. Seksi Pengembangan Kota

Pada saat itu terjadi serah terima jabatan antara Yazmi Yahya Bmue dengan Zubair Syaipuddin. Pada masa Zubair Syaipuddin, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan konsep struktur organisasi yang baru berpola maksimal. Namun setelah terlaksana misi tersebut, beliau digantikan oleh Wasnuri Marza tepatnya pada tanggal 29 April 1993. Setelah Wasnuri Marza menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dipindahkan dari Kantor Walikota Pekanbaru Ke Jalan Dagang No.78 Pekanbaru dan saat itu struktur organisasi berpola maksimal dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : KPTS. 060/40/ORTAL/1993 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Pekanbaru tanggal 2 Juni 1993 dengan 1 Sub dan 5 Seksi.

Bapak Wasnuri Mirza selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru menjabat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, kemudian beliau digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi yang menjabat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, beliau tidaklah bertahan lama karena kepindahan beliau ke BAPPEDA. Setelah itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dikepalai oleh

Bapak Ir. Firdaus CES sampai tahun 2007 dan selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Kemudian digantikan oleh Bapak Ir. H. Idris Sani, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sampai tahun 2009. Selanjutnya digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi sampai tahun 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak H. Zulkifli, H,ST. MP dan sekarang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bpaka Indra Pomi Nasution ST. Msi.

a. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang profesional, amanah dan santun di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Mandani”

b. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menerapkan visi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang transparan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, sosial kemasyarakatan dan K3 (kebersihan, ketertiban dan keindahan).
4. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
5. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pembinaan secara berkesinambungan.

6. Menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui retrebusi dan pendapatan lainnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Adapun untuk tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
5. Penyelenggaraan urusan dan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
2. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
6. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantordan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
2. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.

6. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
7. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
8. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
9. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.
  3. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Sumber Daya Air
- Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

3. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
4. Pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
6. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Sumber Daya Air.
7. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
8. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga. Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan.
2. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Pengekoordinasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
4. Pengekoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.
5. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem modal transportasi bersama instansi terkait.
6. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian.
8. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.

9. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
10. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan cipta karya. Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
2. Perencanaan dan pengendalian bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
3. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.

5. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kegiatan di Bidang Cipta Karya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
  6. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
  7. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
  8. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Cipta Karya.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Bidang Jasa Konstruksi
- Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan jasa konstruksi. Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi.
  2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kota Pekanbaru.
  3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.

4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
  5. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
  6. Penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian izin di Bidang Jasa Konstruksi.
  7. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Jasa Konstruksi.
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Bidang Tata Ruang
- Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata ruang. Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penataan ruang.
  2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang.
  3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan penataan ruang.
  4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penataan ruang.
  5. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang.
7. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penataan ruang.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertamanan. Bidang Pertamanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
2. Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di Bidang Pertamanan.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pertamanan.
4. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertamanan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan bab V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas informan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Identitas informan Berdasarkan Umur

Sehubung dengan ketertarikan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam bersikap terhadap suatu permasalahan, maka pada tabel berikut akan digambarkan kriteria umur responden sebagai berikut :

**Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Kelompok umur	Jumlah	Persentase
1	23-35	12 orang	36 %
2	36-45	9 orang	27 %
3	46-55	8 orang	24%
4	56-70	4 orang	12 %
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan kelompok umur adalah dari 33 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 12 orang (36 %) kelompok umur antara 23 – 35 tahun, sebanyak 9 orang (27 % ) berumur antara 36-45 tahun, sebanyak 8 orang (24 %) kelompok umur 46-55 tahun dan sebanyak 4 orang (12 %) berumur antara 56-70 tahun. Dari identitas

responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan umur didominasi oleh responden yang berumur 23-35 tahun.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data yang diperoleh dilapangan identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	18 orang	55 %
2	Perempuan	15 orang	45 %
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenis kelamin yaitu dari 33 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 18 orang (55 %) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 15 orang (45 %) berjenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki.

## 3. Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang penting karena dapat menciptakan keterampilan dan keahlian yang akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tinggi rendahnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi sikap dan pola Fikir seseorang terutama ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	9 orang	27 %
2	SLTA	17 orang	52 %
3	Strata 1	7 orang	21 %
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenjang pendidikan adalah dari 33 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 9 orang (27 %) berjenjang pendidikan SLTP, sebanyak 17 orang (52%) berjenjang pendidikan SLTA dan sebanyak 7 orang (21 %) berjenjang pendidikan Strata 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan jenjang pendidikan lebih didominasi oleh responden yang berpendidikan SLTA.

#### **4. Data Jumlah Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong di Kecamatan Pekanbaru Kota, Marpoyan Damai dan Bukit Raya Tahun 2019**

Berikut ini adalah informasi data jumlah pembangunan drainase dan gorong-gorong yang berada di Kecamatan Pekanbaru Kota yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4 : Data Jumlah Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong di kecamatan Pekanbaru Kota Realisasi Tahun 2019**

No	Nama Jalan	Drainase	Gorong-gorong
1	Jl. Ahmad Yani	-	4 unit
2	Jl. Sudirman	-	2 unit
3	Jl. Pangeran Hidayat	-	5 unit
4	Jl. Hangtuah	-	1 unit
5	Jl. Ade Irma Suryani	750m	3 unit
6	Jl. Siberut	-	1 unit
7	Jl. Engganu	-	-
8	Jl. Serasan	-	2 unit
9	Jl. Sumatera	1000m	3 unit
10	Jl. Pattimura	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1750m</b>	<b>21 unit</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

Berikut ini adalah informasi data jumlah pembangunan drainase dan gorong-gorong yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel V.5 : Data Jumlah Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong di kecamatan Marpoyan Damai Realisasi Tahun 2019**

No	Nama Jalan	Drainase	Gorong-gorong
1	Jl. Terubuk	550m	4 unit
2	Jl. Markisa	700m	4 unit
3	Jl. Duku	800m	4 unit
4	Jl. Tambusai	-	3 unit
5	Jl. Gulama	-	5 unit
6	Jl. Merak	-	2 unit
7	Jl. Arifin Ahmad	1000m	4 unit
8	Jl. Kereta Api	-	4 unit
9	Jl. Paus	-	3 unit
10	Jl. Garuda	1000m	6 unit
<b>Jumlah</b>		<b>4050m</b>	<b>39 unit</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

Berikut ini adalah informasi data jumlah pembangunan drainase dan gorong-gorong yang berada di Kecamatan Bukit Raya yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel V.6 : Data Jumlah Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong di kecamatan Bukit Raya Realisasi Tahun 2019**

No	Nama Jalan	Drainase	Gorong-gorong
1	Jl. Kandis Ujung	600m	3 unit
2	Jl. Banda Aceh	-	4 unit
3	Jl. Parit Indah	400m	3 unit
4	Jl. Bukit Barisan	-	3 unit
5	Jl. Rawa Mangun	-	1 unit
6	Jl. Surabaya	-	2 unit
7	Jl. Lumba-lumba	-	2 unit
8	Jl. Kaharuddin Nasution	-	6 unit
9	Jl. Karya Seni	-	3 unit
10	Jl. Tengku Bey	-	5 unit
<b>Jumlah</b>		<b>1000m</b>	<b>32 unit</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

**5. Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase dan Jumlah Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase di Kecamatan pekanbaru Kota, marpoyan Damai dan Bukit Raya Tahun 2019**

Berikut ini adalah informasi mengenai informasi pelaksanaan normalisasi saluran drainase dan jumlah rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase oleh Dinas PU Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019

**Tabel V.7 : Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase dan Jumlah Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019**

No	Nama Drainase	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Rehabilitasi Drainase	Waktu Pengerjaan
1	Drainase Ahmad Yani	4 Februari	900 m	30 hari
2	Drainase Sudirman	3 Februari	1.350 m	25 hari
3	Drainase Pangeran Hidayat	5 Februari	700 m	15 hari
4	Drainase Hangtuh	10 Februari	1.500 m	30 hari
5	Drainase Ade Irma Suryani	13 Februari	-	-
6	Drainase Siberut	17 Februari	1.000 m	20 hari
7	Drainase Engganu	18 Februari	700 m	15 hari
8	Drainase Serasan	19 Februari	750 m	15 hari
9	Drainase Sumatera	20 Februari	850 m	18 hari
10	Drainase Pattimura	12 Februari	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 hari</b>	<b>7.050 m</b>	<b>168 hari</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

Berikut ini adalah informasi mengenai informasi pelaksanaan normalisasi saluran drainase dan jumlah rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase oleh Dinas PU Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2019

**Tabel V.8 : Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase dan Jumlah Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019**

No	Nama Drainase	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Rehabilitasi Drainase	Waktu Pengerjaan
1	Drainase Terubuk	1 April	1.000 m	30 hari
2	Drainase Markisa	2 April	900 m	25 hari
3	Drainase Duku	3 April	700 m	15 hari
4	Drainase Tambusai	4 April	1.800 m	40 hari
5	Drainase Gulama	-	-	-
6	Drainase Merak	7 April	400 m	10 hari
7	Drainase Arifin Ahmad	9 April	700 m	15 hari
8	Drainase Kereta Api	10 April	750 m	15 hari
9	Drainase Paus	11 April	1.200 m	35 hari
10	Drainase Garuda	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8 hari</b>	<b>7.450 m</b>	<b>185 hari</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

Berikut ini adalah informasi mengenai informasi pelaksanaan normalisasi saluran drainase dan jumlah rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase oleh Dinas PU Kota Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya tahun 2019

**Tabel V.9 : Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase dan Jumlah Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase di Kecamatan Bukit Raya Tahun 2019**

No	Nama Drainase	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Rehabilitasi Drainase	Waktu Pengerjaan
1	Drainase Kandis Ujung	8 September	800m	20 hari
2	Drainase Banda Aceh	9 September	900 m	20 hari
3	Drainase Parit Indah	10 September	600 m	10 hari
4	Drainase Bukit Barisan	11 September	900 m	20 hari
5	Drainase Rawa Mangun	-	-	-
6	Drainase Surabaya	18 September	400 m	10 hari
7	Drainase Lumba-lumba	19 September	400 m	10 hari
8	Drainase Kaharuddin Nasution	20 September	1000 m	30 hari
9	Drainase Karya Seni	22 September	400 m	10 hari
10	Drainase Tengku Bey	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8 hari</b>	<b>5.400 m</b>	<b>130 hari</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru 2019

## **B. Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru**

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menentukan sebagaimana berikut: “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat”. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan yang tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan usaha di dalam wilayah kota sangat dibutuhkan. Sesuai dengan tujuan hukum agraria nasional sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk : Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi

keandalan pelayanan, Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan dan meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air”.

Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru No 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyatakan bahwa “Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah satuan kerja pada Kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya.

Untuk mengetahui pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru, penulis telah menetapkan beberapa indikator yaitu :

### **1. Perencanaan**

George R. Terry dalam bukunya Principles of Management mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu Perencanaan adalah memilih fakta dan

penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun tanggapan dari masyarakat mengenai perencanaan yang dilakukan oleh pihak dinas mengenai pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru adalah

**Tabel V.10 Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas Mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Mengidentifikasi Masalah	0	19	11	30
2	Mengimplementasi rencana tindakan	0	17	13	30
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>60</b>
	<b>Rata – Rata</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>0</b>	<b>60 %</b>	<b>40 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas Mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru adalah dari 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 18 orang (60 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang (40 %) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak

Dinas Mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mengenai Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

*“.....kami sudah membuat suatu rencana yang akan dilakukan dalam penanganan banjir di Kota Pekanbaru seperti menyiapkan bahan pembangunan prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase”.*

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas mengenai Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*“.....untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru ini, kami sudah membuat program Detailed Engineering Design (DED). Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih fokus dalam pemetaan kawasan banjir”.*

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*“.....Pemko masih fokus pada master plan penanganan banjir tahun 2020 ini. Ada juga rencana fisik untuk membuat sumur resapan”.*

Sementara itu, hasil observasi yang penulis lakukan mengenai perencanaan yang dilakukan oleh pihak dinas dalam pengelolaan drainase sudah cukup baik. Perencanaan yang dibuat oleh pihak dinas membuat master plan dan rencana fisik disetiap daerah yang terkena banjir. Rencana fisik tersebut sudah dibuat dalam bentuk gambar serta rencana yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah banjir.

**Tabel V.11 Hasil Observasi Perencanaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Daya Air Dalam Menangasni Banjir di Kota Pekanbaru.**

NO	NAMA KEGIATAN	KETERANGAN
1	Nama Kegiatan	Perencanaan Drainase Kota Pekanbaru
2	Waktu Kegiatan	1 Februari 2019
3	Tempat Kegiatan	Aula Kantor BAPPEDA Kota Pekanbaru
4	Pelaksanaan	Kepala Dinas BAPPEDA Kota Pekanbaru
5	Aparat yang Terlibat	Anggota BAPPEDA Kota Pekanbaru
6	Hasil Observasi	Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong

Dengan demikian hasil kuisisioner dan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari program pihak dinas dalam penanganan banjir di Kota Pekanbaru.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas - tugas tertentu untuk masing - masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu penentuan, pengelompokkan, dan

penyusunan macam - macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel V.12 Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Pengorganisasian Pihak Dinas Dalam Pengelolaan Drainase Untuk Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kerjasama dengan instansi terkait	0	16	14	30
2	Koordinasi tugas dan wewenang	0	17	13	30
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>60</b>
	<b>Rata - Rata</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>0</b>	<b>52 %</b>	<b>48 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui tanggapan dari masyarakat mengenai pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah dari 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 17 orang (52%) menyatakan cukup baik dan sebanyak 13 orang (48%) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mengenai pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

*“.....dalam pengelolaan drainase, pihak dinas sudah berkoordinasi dengan pihak dinas kebersihan dan Satpol-PP bagi rumah yang tidak membuat sumur resapan”.*

Sementara itu hasil wawancar penulis dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air mengenai pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

*“.....pengorganisasian ini tidak ada masalah dan organisasi yang bekerja menangani drainase ini dapat kita lihat dari struktur organisasi yang telah di buat*

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

*“.....Masterplan atau rencana induk terhadap penanganan banjir sejak tahun 2005 lalu, pada zaman Pak Herman Abdullah jadi Walikota Pekanbaru sudah disusun. Namun itu butuh perbaikan, karena sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada saat ini.*

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak dinas dalam pengelolaan drainase adalah penulis melihat koordinasi yang dilakukan oleh dinas PUPR terhadap dinas kebersihan untuk melakukan pembersihan setiap drainase dan Satpol-PP untuk melakukan pengamanan terhadap bangunan yang tidak membuat sistem drainase sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pengorganisasian pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas dalam pengelolaan drainase untuk mencegah banjir.

### 3. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management mengatakan bahwa Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel V.13 Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Drainase Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	0	19	11	30
2	Melakukan program normalisasi saluran drainase	0	15	15	30
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>60</b>
	<b>Rata – Rata</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>0</b>	<b>57%</b>	<b>43 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.13 dapat diketahui tanggapan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir di Kota Pekanbaru adalah dari 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 17 orang (57%) menyatakan cukup baik dan sebanyak 13 orang (43%) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mengenai pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir di Kota Pekanbaru adalah

*“.....dalam hal pelaksanaan pengelolaan drainase, kami sudah melakukan normalisasi drainase setiap daerah yang terkena banjir seperti melakukan pengerukan drainase drainase yang tersumbat”.*

Selain itu juga, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air mengenai pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir di Kota Pekanbaru adalah

*“.....untuk pelaksanaan pengelolaan drainase, kami sudah melakukan pemeliharaan rutin terhadap drainase yang ada di Kota Pekanbaru terutama yang sering terkena banjir seperti pengangkutan sampah, pengerukan sedimen”.*

Sementara itu, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir di Kota Pekanbaru adalah

*“..Pemeliharaan sistem drainase dengan program pengangkutan sampah tidak serta merta hanya menjadi tanggung jawab dari instansi pemerintahan saja melainkan adanya peran serta masyarakat untuk sama-sama memelihara saluran drainase yang ada di lingkungan masing-masing”.*

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan drainase yang dilakukan oleh pihak dinas sudah cukup baik seperti melakukan perbaikan terhadap drainase yang sudah mengalami kerusakan dan menambah jumlah drainase serta melakukan pembersihan terhadap drainase yang sudah tersumbat bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan drainase dalam menangani banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari pihak dinas yang melakukan pemeliharaan rutin terhadap drainase yang ada di Kota Pekanbaru khususnya di daerah yang sering terkena banjir.

#### **4. Budgetting (Penganggaran)**

Menurut George R. Terry merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.14 Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Penganggaran Dalam Pengelolaan Drainase Untuk Mengatasi Banjir Di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Penyusunan anggaran dana	0	19	11	30
2	Menyediakan fasilitas	0	15	15	30
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>60</b>
	<b>Rata - Rata</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>0</b>	<b>57%</b>	<b>43 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.14 diatas dapat diketahui tanggapan dari masyarakat mengenai penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru adalah dari 33 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 17 orang (57%) menyatakan cukup baik dan sebanyak 13 orang (43%) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mengenai penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru adalah

*“.....Anggaran untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru hanya sekitar Rp2,2 miliar. Jumlah ini adalah anggaran operasional dan pemeliharaan serta normalisasi aliran sungai Jadi anggarannya memang terbatas, termasuk anggaran bagi pasukan kuning”.*

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air mengenai penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru adalah

*“.....untuk anggaran pengelolaan drainase ini sangat kecil untuk tahun 2020 sebesar 2,2 miliar. Saya kira, anggaran Rp 2,2 miliar sangat mengecewakan masyarakat kota Pekanbaru dan tidak cukup untuk menangani masalah banjir”.*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru adalah

*“...saat ini anggaran untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru hanya sekitar Rp2,2 miliar. Jumlah ini merupakan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan, serta normalisasi aliran sungai sedangkan untuk fasilitas kita sudah punya mobil keamanan, dump truck, excavator dll”.*

Dari hasil observasi yang penulis lakukan mengenai penganggaran dalam pengelolaan drainase sudah cukup baik. Penulis melihat Rencana Kerja Anggaran Dinas yang diperuntukan untuk perawatan dan pemeliharaan, hanya saja anggaran yang tentang di dalam RKA dinas masih sangat terbatas untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik dan hanya saja dana yang ada untuk melakukan pemeliharaan serta normalisasi drainase masih sangat terbatas.

## **5. Pengawasan**

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa controlling, yaitu Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan,

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.15 Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Pengawasan Dalam Pengelolaan Drainase Di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Melaksanakan pemeriksaan	0	16	14	30
2	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	0	17	13	30
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>60</b>
	<b>Rata – Rata</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>0</b>	<b>52 %</b>	<b>48 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.15 dapat diketahui tanggapan dari masyarakat mengenai pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru adalah dari 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 17 orang (52%) menyatakan cukup baik dan sebanyak 13 orang (48%) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mengenai pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru adalah

*“.....Pengawasan secara berkala di lapangan sudah kami lakukan serta masukkan dari masyarakat menjadi hal yang sangat di perlukan. Jika kiranya terkait anggaran, maka kita siap mendukung dalam penganggarannya”.*

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air mengenai pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru adalah

*“.....Dalam hal ini pengawasan itu di mulai pada saat pendataan mulai dilakukan, maka sejak saat itulah pengawasan bersangung”.*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru adalah

*“...untuk pengawasan, kita sudah ada Konsultan pengawasan dan Konsultan perencanaan itu Independen dari luar, independen membuat juga laporan berkala untuk Dinas. Independen yang melaksanaka pengawasan lapangan. Namun bukan berarti pengawasan itu hanya dari pihak luar saja, tapi pengawasan internal sendiri juga melakukan pengawasan”.*

Dari hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pengawasan pihak dinas masih dikatakan kurang baik. Pihak dinas sangat jarang sekali melakukan pengawasan terhadap drainase wilayah yang sering terjadi banjir. Pihak dinas hanya melakukan kegiatan tersebut disaat sudah terjadi banjir, baru pihak dinas melakukan pemeriksaan terhadap drainase-drainase tersebut.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat bahwa untuk pengawasan, pihak dinas sudah ada Konsultan pengawasan dan Konsultan perencanaan itu Independen dari luar, independen membuat juga laporan berkala untuk Dinas. Independen yang melaksanakan pengawasan lapangan. Namun bukan berarti pengawasan itu hanya dari pihak luar saja, tapi pengawasan internal sendiri juga melakukan pengawasan.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.16 Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Perencanaan	0	18	12	30
2	Pengorganisasian	0	17	13	30
3	Pelaksanaan	0	17	13	30
4	Penganggaran	0	17	13	30
5	Pengawasan	0	17	13	30
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>150</b>
	<b>Rata – Rata</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>0</b>	<b>57 %</b>	<b>43%</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.16 diatas dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru adalah dari 17 orang (57 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 13 orang (43 %) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Akan tetapi masih ada drainase yang belum berfungsi secara menyeluruh, terutama pada kawasan - kawasan rendah dan cekung. Untuk menanggulangi genangan air hujan tersebut diperlukan perencanaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Drainase berwawasan lingkungan adalah

prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, dimana pembangunannya terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang.

### **C. Hambatan Dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru**

Meskipun sistem jaringan drainase di Kota Pekanbaru telah direncanakan berdasarkan ilmu drainase, namun masalah-masalah drainase yang ada di perkotaan tidak bisa dihindari. Berikut Kendala-Kendala yang dirangkum berdasarkan hasil wawancara dengan para responden terkait Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru :

#### 1. Sumber daya finansial tidak memadai

Ketika sumber daya manusia sudah memadai, dan berkompeten akan menjadi sia-sia ketika anggaran dana tidak tersedia. Maka, tersedianya anggaran dana juga menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan suatu program kebijakan mustahil berjalan sesuai dengan rencana jika anggaran dana tidak mampu mengakomodir.

Dalam kegiatannya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan dihitung terlebih dahulu kemudian di ajukan untuk tahun berikutnya. Kucuran dana dalam sebuah kegiatan memang sangat penting dalam semua kegiatan karena memang dalam pelaksanaannya membutuhkan untuk membeli bahan baku bangunan, menggaji para pekerjanya.

## 2. Banyaknya bangunan liar

Pembangunan suatu gedung atau infrastruktur pada suatu daerah atau kawasan sebaiknya perlu memperhatikan infrastruktur pendukung seperti saluran drainase agar tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan pengguna dan menyebabkan kerusakan pada gedung atau infrastruktur itu sendiri. Kelebihan air hujan pada suatu daerah atau kawasan dapat menimbulkan suatu masalah yaitu banjir atau genangan air, sehingga diperlukan adanya saluran drainase yang berfungsi menampung air hujan dan kemudian mengalirkannya ke kolom penampungan atau ke sungai. Guna mengantisipasi terjadinya genangan atau banjir nantinya, maka perlu dilakukan suatu perencanaan pembuatan saluran drainase yaitu menghitung kapasitas saluran sesuai dengan debit rencana sehingga dapat ditentukan saluran dimensi rencana.

## 3. Kurangnya keterlibatan masyarakat

Selain menjadi kewajiban pemerintah kota, masyarakat juga harus terlibat dalam saluran drainase ini. Karena yang akan terkena dampak dari genangan dan banjir adalah warga sekitar dengan aktifitas yang akan terganggu ataupun rusaknya barang-barang rumah tangga oleh genangan air terutama elektronik. Untuk itu perlunya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya saluran drainase terhadap lingkungan pemukiman. Masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan harus ikut berpartisipasi dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru bahwa Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Akan tetapi masih ada drainase yang belum berfungsi secara menyeluruh, terutama pada kawasan - kawasan rendah dan cekung. Untuk menanggulangi genangan air hujan tersebut diperlukan perencanaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Drainase berwawasan lingkungan adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, dimana pembangunannya terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang.
2. Hambatan dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Pekanbaru adalah sumber daya finansial kurang memadai, banyaknya bangunan liar dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

## B. Saran

1. Pentingnya sosialisasi keseluruhan wilayah Kota Pekanbaru, terutama tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan saluran drainase, dan pentingnya adanya saluran drainase. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
2. Dilakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase yang sudah ada. Pemeliharaan drainase dilakukan dengan mempertimbangkan curah hujan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Koordinasi dan kewenangan dengan pihak-pihak yang terkait harus berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dan permasalahan drainase di Kota Pekanbaru dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Garna, 1996, *Ilmu- Ilmu Sosial Dasar*, Konsepsi, Bandung
- Giroth, 2004, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Teori*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadisusanto, 2010, *Aplikasi Hidrologi*, Jogja Media Utama, Yogyakarta
- Hamdi, 2009, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kodoatie, dan Sugiyanto, 2002, *Banjir (Beberapa Penyebab dan Metode. Pengendalian Banjir dalam Perspektif Lingkungan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ligal, 2008, *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Moekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung
- Ndraha, 2005, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahayu dkk, 2009, *Banjir dan Upaya Penanggulangannya*, Pusat. Mitigasi Bencana (PMB-ITB), Bandung.
- Rasyid, 2000, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2009, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Situmorang, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Somantri, 2008, *Kajian Mitigasi Bencana Longsor Lahan dan tanah longsor*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Suripin, 2004, *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Sumardjo, 1996, *Manajemen Logistik Peralatan Kerja dan Alat Berat*, Panca, Jakarta.

Sukarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Syafiie, 2005, *Filsafat Pemerintahan*, Penerbit Perca, Jakarta.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

## **B. Dokumentasi**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR